

## **KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW**

**Ratu Tanti Rizky<sup>1\*</sup>, Henny Suharyati<sup>2</sup>, Nadya Hertya Putri Fakhruddin<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan

<sup>3</sup>Universitas Padjadjaran

Email: [ratutanti@gmail.com](mailto:ratutanti@gmail.com)\*

Article History	Received 2025-07-09	Accepted 2025-09-23	Published 2025-12-05
-----------------	------------------------	------------------------	-------------------------

### **Abstrak**

Penelitian ini menyajikan perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia guna memberikan analisis komprehensif tentang tren, masalah, dan bentuk kebijakan pendidikan di Indonesia. Penulisan menggunakan *Systematic Literature Review* dengan prosedur PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis*). Artikel dipilih berdasarkan *database* Scopus dengan kata kunci “*education policy in indonesia*” dan dibatasi pada artikel berperingkat Q1, Q2, Q3, dan Q4, yang terbit pada Tahun 2015 hingga 2025. Berdasarkan 14 artikel relevan yang teridentifikasi, menunjukkan bahwa dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor politik, budaya, ekonomi, dan tuntutan global. Temuan ini menegaskan perlunya desain kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, responsif terhadap konteks lokal, dan berkelanjutan, guna memastikan peningkatan akses, kualitas, serta pemerataan layanan pendidikan di Indonesia. Kajian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

**Kata kunci:** kebijakan pendidikan, systematic literature review, prisma 2020

### **Abstract**

*This study presents developments in education policy in Indonesia to provide a comprehensive analysis of trends, issues, and forms of education policy in Indonesia. The writing uses a Systematic Literature Review with the PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis) procedure. Articles were selected from the Scopus database using the keyword “education policy in Indonesia” and limited to articles ranked Q1, Q2, Q3, and Q4, published between 2015 and 2025. Based on the 14 relevant articles identified, it was found that the dynamics of education policy in Indonesia are influenced by the complex interaction between political, cultural, economic, and global demands. These findings underscore the need for more adaptive, context-responsive, and sustainable education policy design to ensure improved access, quality, and equity in education services in Indonesia. This study provides significant contributions to policymakers, academics, and education practitioners in formulating more effective and inclusive policy strategies.*

**Keywords:** *education policy, systematic literature review, prism 2020*



This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## A. PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan memainkan peran penting sebagai kerangka normatif dan operasional yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan nasional. Untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang efektif dan berdaya guna, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap dokumen kebijakan sebagai rujukan utama dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan tersebut.

Dokumen kebijakan merupakan sumber informasi yang penting untuk penelitian. Kebijakan menunjukkan perkembangan teoretis yang terlihat dalam pidato politik atau materi kampanye dan selanjutnya mengartikulasikan niat pemerintah dalam bentuk konkret (Ridgway, 2023). Analisis kebijakan dapat membantu memperjelas masalah, memilih kebijakan yang tersedia, efektivitas, dan efisiensi kebijakan, dan pada akhirnya dapat membantu dalam pemilihan dan preferensi pembuat kebijakan dan masyarakat (Sarghini et al., 2023).

Kebijakan pendidikan bagian dari intervensi sistematis untuk meningkatkan praktik pendidikan di semua tingkatan. Kata sistematis digunakan untuk menggambarkan suatu proses di mana sarana dan sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan berupa target atau sasaran. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan pendidikan yang potensial (Papanikos, n.d.). Kebijakan pendidikan juga dipahami sebagai pedoman yang harus diikuti oleh pelaku pendidikan dalam menjalankan proses pendidikan di suatu negara. Kebijakan ini berfungsi sebagai kerangka untuk pengambilan keputusan serta memberikan arahan bagi institusi pendidikan, pendidik, peserta didik, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan (Thoma, 2022).

Serangkaian tindakan, rencana, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, otoritas pendidikan, atau lembaga terkait untuk mengatur sistem pendidikan negara atau wilayah merupakan bentuk kebijakan pendidikan. Tujuan utama kebijakan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan setara kepada seluruh warga negara, dan mewujudkan tujuan pendidikan tertentu (Jannata et al., 2024). Perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta membangun sistem yang lebih fleksibel, adaptif, dan berpusat pada peserta didik, serta mendorong terbentuknya generasi yang berkarakter, kompeten, dan siap bersaing di tingkat global (Saa, 2024).

Namun demikian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan kerap menghadapi berbagai hambatan, baik dalam aspek regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, maupun resistensi dari pelaksana di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketergantungan kebijakan pada dinamika politik, di mana pergantian menteri sering kali disertai dengan perubahan kurikulum. Hal ini menyebabkan kebijakan pendidikan menjadi tidak stabil dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat daripada berorientasi pada kebutuhan jangka panjang dunia pendidikan (Sumarjono et al., 2024).

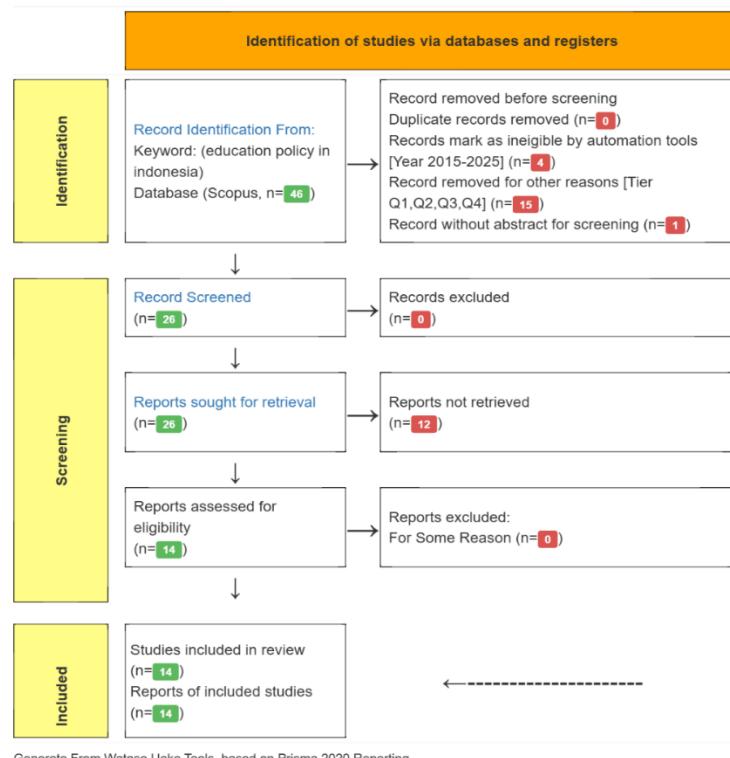
Kendala lainnya adalah berupa kesenjangan yang cukup besar antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah keyakinan yang keliru bahwa dokumen kebijakan secara otomatis mampu

menggerakkan perubahan di institusi pendidikan, padahal tanpa dukungan mekanisme implementasi yang kuat, kebijakan seringkali hanya menjadi formalitas administratif (Nengyanti et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dimensi teoritis dan praktis kebijakan pendidikan menjadi suatu keniscayaan, terutama bagi para pengambil keputusan, akademisi, dan praktisi pendidikan.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang tren, masalah, dan bentuk kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan systematic literature review pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan analisis kebijakan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam tinjauan sistematis literatur yang dihasilkan dari sistem Watase Uake dijelaskan tahapan berupa; 1) Mengidentifikasi kata kunci, kriteria, dan lingkup penelitian, 2) Menyaring artikel yang relevan, 3) Mencari artikel dari hasil penelusuran yang dipilih dan kemungkinan eksklusi, 4) Membaca judul, abstrak, dan kata kunci dari artikel yang dipilih, 5) Mengisi jalur dan item dari setiap artikel yang dipilih dalam proses ekstraksi, 6) Menganalisis klasifikasi, analisis jaringan, hipotesis jaringan, dan visualisasi. Maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian, yaitu : Bagaimana bentuk dan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN

Pendekatan sistematis yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode *Systematic Literatur Review* (SLR) dengan prosedur PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis*). Karena teknik ini memiliki pedoman yang telah ditetapkan dengan baik yang dapat memfasilitasi metode review (Moher et al., 2016; Sharma & Bhattacharai, 2022). SLR dengan Model PRISMA 2020 melalui tiga fase yaitu *Identifikation (Retrieval and screening)*, *Screening (and Eligibility Assessment)*, dan *Included* (Page et al., 2021). Penerapan prosedur PRISMA 2020 dibantu menggunakan aplikasi Watase Uake, dan Artikel diambil berdasarkan *database* Scopus dengan dibatasi pada artikel berperingkat Q1, Q2, Q3, dan Q4, yang terbit pada tahun 2015 hingga 2025. Penelitian dilanjutkan dengan analisis kualitatif, berupa pengisian jalur dan item dari setiap artikel yang dipilih dalam proses ekstraksi, yang akan menghasilkan bentuk analisis klasifikasi, dan visualisasi.

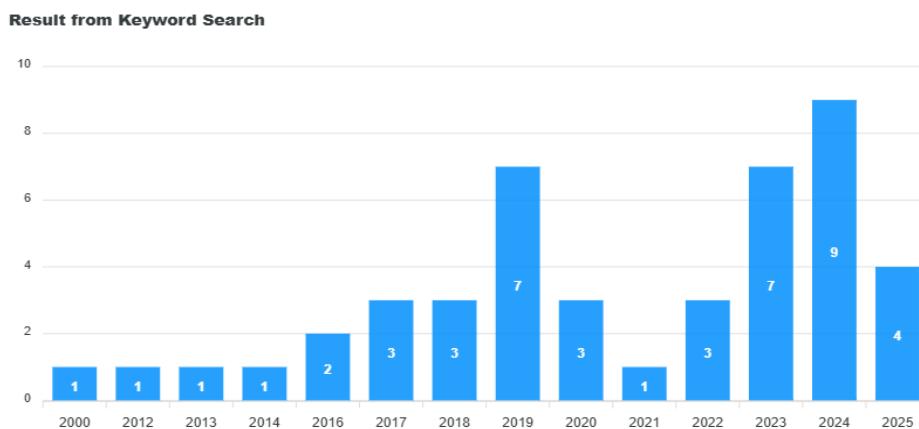


Gambar 1. Fase *Identifikation*, *Screening*, dan *Included*

Pada penelitian ini, protokol PRISMA 2020 menyediakan kerangka kerja dalam menyaring dan membantu memfinalisasi artikel yang dapat dianalisis ke dalam penelitian seperti yang tercantum pada gambar 1. Pada fase *identifikation*, penelusuran artikel berbasis data Scopus ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci “*education policy in indonesia*” dan menghasilkan 46 artikel. Kemudian pencarian data dibatasi dengan waktu publikasi artikel yaitu artikel yang terbit Tahun 2015 hingga 2025. Dari *screening* tersebut dikeluarkan 4 artikel yang merupakan tahun publikasi diluar ketentuan, dan pada hasil penelusuran tidak ditemukan adanya artikel yang duplikat atau ganda, selanjutnya satu artikel dikeluarkan berdasarkan abstrak yang tidak sesuai. Berikutnya sistem mengeluarkan 15 (tiga) artikel yang bukan bagian dari artikel berperingkat Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sehingga pada fase *screening* tersisa 26 artikel yang memenuhi syarat relevansi serta isinya. Pada tahap *included*, 14 artikel berhasil *diretrieved* masuk *eligibility* dan bisa dianalisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan topik kebijakan pendidikan di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dibahas oleh peneliti dikarenakan jumlah publikasi artikel topik tersebut pada *database* Scopus dari tahun 2015 hingga 2025 sejumlah 46 artikel. Untuk publikasi topik kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami kenaikan signifikan mulai rentang tahun 2018 dan terus meningkat setiap tahunnya berdasarkan data analisis dengan Watase Uake (Gambar 2).



**Gambar 2.** Jumlah Publikasi Artikel Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Ini dapat dilihat di *database* Scopus pada tahun 2018 sebanyak tiga publikasi artikel topik kebijakan pendidikan di Indonesia menjadi tujuh artikel pada Tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 menurun karena dampak pandemi Covid-19 dan tren selanjutnya meningkat terus. Di samping itu isu yang sangat krusial mengenai pemilihan topik kebijakan pendidikan di Indonesia adalah karena diera digital ini terutama setelah dampak Covid-19, dunia pendidikan mempunyai tantangan yang besar sehingga memaksa pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan baru, mulai dari penyederhanaan kurikulum, perubahan sistem asesmen, hingga penguatan program pembelajaran jarak jauh.

Selanjutnya berdasarkan analisis visualisasi jaringan melalui bantuan aplikasi Watase Uake, dengan batasan yang sama yaitu penelitian relevan yang diambil berdasarkan *database* Scopus berperingkat Q1, Q2, Q3, dan Q4, yang terbit pada Tahun 2015 hingga 2025. Penelusuran artikel menggunakan kata kunci “*education policy in indonesia*”, menghasilkan faktor-faktor terkait kebijakan pendidikan di Indonesia seperti yang ditunjukkan *wordcloud* pada gambar 3.



**Gambar 3.** Wordcloud Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Faktor-faktor yang banyak dibahas terkait kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan *wordcloud* hasil penelitian yang ada adalah : pendidikan vokasi, pendidikan islam, politik dalam kebijakan pendidikan, pendidikan anak usia dini, implementasi kebijakan pendidikan, desentralisasi, pendidikan tinggi, pendidikan guru, serta masih banyak faktor terkait lainnya yang dapat diteliti secara mendalam dan menjadi bahan kajian selanjutnya.

Tabel 1 menyajikan 14 artikel tentang kebijakan pendidikan di Indonesia yang telah terbit pada jurnal internasional berbasis data scopus berdasarkan *SLR* yang telah disebutkan. Data judul penelitian menunjukkan bahwa tema kebijakan pendidikan tinggi dan perkembangan kebijakan pendidikan lebih banyak dibanding tema kebijakan lainnya dengan masing-masing sejumlah tiga artikel. Tema lainnya sejumlah dua artikel adalah tentang kebijakan kurikulum dan pembelajaran serta kebijakan pendidikan gratis, dan sejumlah satu artikel berupa tema kebijakan pendidikan Inklusif, kebijakan sistem desentralisasi, juga kebijakan tenaga pendidik.

**Tabel 1.** Artikel Kebijakan Pendidikan di Indonesia

No	Sumber	Judul	Jurnal	Rank
1.	(Pambudi & Ulfa, 2024)	<i>The geothermal energy landscape in Indonesia: A comprehensive 2023 update on power generation, policies, risks, phase and the role of education</i>	<i>Renewable and Sustainable Energy Reviews</i>	Q1
2.	(Arif et al., 2024)	<i>Does decentralisation promote learning? Local political settlements and education policies in Indonesia</i>	<i>Compare: A Journal of Comparative and International Education</i>	Q1
3.	(Kosim et al., 2023)	<i>The dynamics of Islamic education policies in Indonesia</i>	<i>Cogent Education</i>	Q2
4.	(Romlah et al., 2023)	<i>A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning</i>	<i>Cogent Education</i>	Q2
5.	(Yasdin et al., 2023)	<i>Policies and politics development of vocational education in Indonesia: a historical perspective</i>	<i>Asian Education and Development Studies</i>	Q3
6.	(Ninghardjanti et al., 2023)	<i>Evaluation of the Smart Indonesia Program as a Policy to Improve Equality in Education</i>	<i>sustainability</i>	Q1
7.	(Parker & Sudibyo, 2024)	<i>Why young people leave school early in Papua, Indonesia, and education policy options to address this problem</i>	<i>Compare: A Journal of Comparative and International Education</i>	Q1
8.	(Madsuha et al., 2022)	<i>The sustainability of graphene research: A novel approach in assessing the role of higher education policies in developing countries—the case of Indonesia</i>	<i>sustainability</i>	Q1
9.	(Mukminin, 2021)	<i>Ethics in Education: an Ethical Analysis of the National Standardized Exam Policy in Indonesia</i>	<i>Logos</i>	Q3
10.	(Effendi et al., 2020)	<i>The principal transformational leadership strategy in developing national policies</i>	<i>Italian Journal Of Sociology Of Education</i>	Q1

		<i>for strengthening character education in eastern Indonesia</i>	
11.	(Gaus et al., 2019)	<i>The analysis of policy implementation models in higher education: the case study of Indonesia</i>	<i>Policy Studies</i> Q1
12.	(Raihani, 2018)	<i>Education for multicultural citizens in Indonesia: policies and practices</i>	<i>Compare: A Journal of Comparative and International Education</i> Q2
13.	(Rosser, 2016)	<i>Neo-liberalism and the politics of higher education policy in Indonesia</i>	<i>Comparative Education</i> Q1
14.	(Zein, 2016)	<i>Pre-service education for primary school English teachers in Indonesia: policy implications</i>	<i>Asia Pacific Journal of Education</i> Q2

Pendekatan penelitian yang digunakan pada 14 artikel ilmiah didominasi oleh metode kualitatif sebanyak tiga belas artikel, dan satu artikel berupa jenis penelitian kuantitatif seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.

**Tabel 2.** Metode Penelitian dan Topik Kebijakan Pendidikan

No	Sumber	Metode Penelitian	Topik Kebijakan
1.	(Pambudi & Ulfa, 2024)	Metode kualitatif	Evaluasi perkembangan pemanfaatan energi geothermal dan peran pendidikan dalam mendukung keberlanjutan pengembangan energi geothermal
2.	(Arif et al., 2024)	Metode kualitatif dengan desain studi kasus	Kebijakan pendidikan yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran dalam konteks sistem desentralisasi
3.	(Kosim et al., 2023)	Metode kualitatif berbasis pendekatan historis dan studi literatur	Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi
4.	(Romlah et al., 2023)	Metode kuantitatif dengan analisis SEM	Kebijakan pendidikan gratis di Indonesia terhadap pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran
5.	(Yasdin et al., 2023)	Metode kualitatif dengan Studi literatur	Kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan
6.	(Ninghardjanti et al., 2023)	Metode kualitatif model evaluasi CIPP	Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)
7.	(Parker & Sudibyo, 2024)	Metode kualitatif	Studi terhadap anak-anak dan remaja di Merauke-Papua yang meninggalkan bangku sekolah lebih awal
8.	(Madsuha et al., 2022)	Metode kualitatif dengan pendekatan bibliometrik berbasis data Scopus	Efektivitas kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia dalam mendukung pengembangan riset material maju, dengan studi kasus pada penelitian Graphene
9.	(Mukminin, 2021)	Metode kualitatif dengan pendekatan <i>Ethic of Critique</i> dan <i>Ethic of Justice</i>	Kebijakan Ujian Nasional di Indonesia

10. (Effendi et al., 2020)	Metode kualitatif dengan desain studi kasus	Peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah berbasis budaya <i>Lonto Leok</i> dalam mendukung implementasi program PPK.
11. (Gaus et al., 2019)	Metode kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur	Implimentasi kebijakan pemerintah di tingkat universitas dan respon akademisi terhadap model-model tersebut.
12. (Raihani, 2018)	Metode kualitatif berbasis dokumen kebijakan dan praktik lapangan	Kebijakan pendidikan di Indonesia selama periode reformasi, yakni sejak jatuhnya rezim Orde Baru hingga dua dekade berikutnya
13. (Rosser, 2016)	Metode kualitatif	Analisis dinamika kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia dalam konteks tekanan globalisasi dan neoliberalisme
14. (Zein, 2016)	Metode kualitatif dengan metode <i>grounded theory</i>	Efektivitas pendidikan prajabatan dalam mempersiapkan guru Bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar (SD) di Indonesia

Pada studi ini bentuk dan implementasi kebijakan pendidikan keempat belas artikel tersebut dibahas sesuai klasifikasi tema kebijakannya sebagai berikut :

### **Kebijakan Evaluasi dan Pembelajaran**

Penelitian (Pambudi & Ulfa, 2024) mengkaji bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya menargetkan peningkatan kontribusi energi panas bumi dalam bauran energi nasional hingga lebih dari 5% pada tahun 2025, dengan mendorong integrasi pendidikan geothermal ke dalam berbagai jenjang pendidikan mulai dari pendidikan tingkat menengah, pendidikan vokasi, hingga perguruan tinggi. Dengan implementasi berupa ; 1) kurikulum SMA yang mencakup materi pengenalan pada pelajaran geografi dan fisika, 2) beberapa SMK memiliki program keahlian energi terbarukan, namun jumlahnya masih terbatas, 3) pengembangan keterampilan teknis dan manajerial dalam bidang energi panas bumi yang dilaksanakan pada level pendidikan vokasi (D4) dan program pascasarjana, 4) terselenggaranya program D4 energi terbarukan di politeknik-politeknik tertentu (Politeknik Negeri Bali, Jakarta, Manado, Ujung Pandang, dan Akamigas), 5) adanya kegiatan pemerintah seperti *Geothermal Goes to Campus* dan pelatihan daring untuk pemanfaatan langsung energi panas bumi.

Penelitian lain oleh Mukminin (2021) mengkritisi tentang kebijakan Ujian Nasional (UN) di Indonesia dengan fokus utama pada pemerataan hasil belajar melalui ujian nasional. Menggunakan pendekatan penelitian etika berdasarkan kerangka teori *Ethic of Critique* dan *Ethic of Justice*, peneliti menjelaskan hasil penelitian kebijakan UN yang bersifat sentralistik dan cenderung tidak adil, terutama bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah serta sekolah-sekolah dengan sumber daya terbatas. Kebijakan ini tidak mempertimbangkan disparitas dalam hal fasilitas, kualitas guru, dan kondisi sosial ekonomi antar wilayah di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini mendorong praktik mengajar yang semata-mata berorientasi pada ujian (*teaching to the test*) dan berdampak negatif pada kesehatan mental siswa, integritas guru, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penelitian tersebut merekomendasikan bahwa kebijakan UN perlu direvisi secara kritis

untuk mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan, dengan penekanan pada akses, kualitas, dan keadilan bagi semua anak Indonesia (Mukminin, 2021).

### **Perkembangan Kebijakan Pendidikan**

Penelitian perkembangan kebijakan pendidikan oleh (Kosim et al., 2023), guna mengkaji bentuk-bentuk kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah umum, madrasah, dan pesantren. Melalui pendekatan historis dan studi literatur, penelitian tersebut menemukan adanya dua fase besar dalam perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: 1) domestikasi (*Domestication Policy*), adalah periode ketika kebijakan pemerintah cenderung menekan dan memmarginalkan pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren, agar tunduk pada sistem pendidikan nasional yang bercorak sekuler, dan 2) akomodasi (*Accommodation Policy*), yaitu fase ketika pemerintah mulai memberikan pengakuan dan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, terutama setelah reformasi kebijakan yang dimulai sejak era Orde Baru.

Selanjutnya penelitian (Yasdin et al., 2023) yang mengkaji perkembangan sejarah dan dinamika politik dalam kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan. Penelitian tersebut menyoroti bahwa kebijakan pendidikan vokasi tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik. Politik identitas masih memainkan peran, baik dalam penentuan bahasa pengantar, kurikulum, maupun orientasi kelembagaan. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan vokasi bersifat elitis, hanya diperuntukkan bagi kalangan Belanda dan Indo. Kurikulum dan bahasa pengantar disesuaikan dengan kepentingan kolonial, mencerminkan dominasi identitas kolonial. Perubahan mulai terjadi pada masa pendudukan Jepang, di mana Jepang mencoba menghapus identitas Belanda dan menggantinya dengan nilai-nilai budaya Jepang. Setelah kemerdekaan, pendidikan vokasi diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Reformasi pendidikan vokasi berlanjut pada masa reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengukuhkan peran pendidikan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Analisis ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan vokasi di Indonesia merupakan hasil dari proses negosiasi antara kepentingan politik, budaya, dan kebutuhan ekonomi nasional yang terus berkembang hingga saat ini.

Sementara kebijakan pendidikan di Indonesia selama periode reformasi, yakni sejak jatuhnya rezim Orde Baru hingga dua dekade berikutnya melahirkan kebijakan yang bersifat desentralisasi pemerintahan, dimana dalam implementasinya terdapat dominasi pendekatan *top-down* dari pemerintah pusat berupa wewenang dan tanggung jawab pendidikan didesentralisasikan ke daerah. Kebijakan lainnya adalah pemerataan akses dan partisipasi pendidikan seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), beasiswa, dan pendidikan gratis di tingkat dasar dan menengah. Serta kebijakan standarisasi dan evaluasi nasional seperti penerapan Ujian Nasional, Kurikulum Nasional (KTSP, K13), serta sistem akreditasi dan sertifikasi guru (Raihani, 2018).

### **Kebijakan Pendidikan Gratis**

Penelitian (Romlah et al., 2023) menyoroti pengaruh kebijakan pendidikan gratis di Indonesia terhadap pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran, dengan menggunakan analisis SEM (*Structural Equation Modeling*) untuk mengukur dampak kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap akses yang setara ke layanan pendidikan. Kebijakan ini juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan secara tidak langsung turut meningkatkan kualitas belajar secara keseluruhan. Selain itu, pemerataan akses terhadap layanan pendidikan secara langsung dan signifikan memengaruhi peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan dukungan, dana, guru berkualitas, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan mutu siswa.

Kebijakan lainnya berupa Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan kebijakan afirmasi dari pemerintah Indonesia dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang ditujukan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Bentuk kebijakan ini adalah kebijakan subsidi pendidikan berbasis kebutuhan yang bertujuan untuk: 1) mengurangi angka putus sekolah, 2) menjamin pemerataan akses pendidikan dasar hingga menengah, 3) membantu meringankan biaya pendidikan, termasuk biaya transportasi, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya. Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar. Walaupun Program Indonesia Pintar berkontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, perbaikan pada sistem data, mekanisme pelaporan, dan akuntabilitas masih sangat dibutuhkan agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan (Ninghardjanti et al., 2023).

### **Kebijakan Pendidikan Inklusif**

(Parker & Sudibyo, 2024) mengungkapkan dalam penelitiannya tentang alasan-alasan utama anak-anak dan remaja di Merauke, Papua, meninggalkan bangku sekolah lebih awal, meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Dalam konteks nasional, pemerintah cenderung memandang putus sekolah sebagai persoalan ekonomi, dan mengatasinya melalui berbagai program bantuan sosial serta peningkatan aspek penyediaan seperti jumlah sekolah. Namun, studi ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi hanyalah sebagian dari kompleksitas permasalahan. Putus sekolah juga dipengaruhi oleh sejarah pendidikan yang tidak konsisten, kualitas sekolah yang buruk, serta faktor sosial-budaya, seperti stigmatisasi terhadap masyarakat adat Marind, adanya rasa rendah diri dan ketidaksesuaian budaya antara kehidupan masyarakat lokal dan sistem sekolah formal. Penulis mengajukan serangkaian kebijakan pendidikan yang lebih peka terhadap konteks lokal untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pendidikan bagi masyarakat Papua, berupa; 1) pemberdayaan guru lokal, 2) penggunaan bahasa lokal (Marind) pada jenjang awal, 3) pengakuan nilai budaya lokal, 4) penegakan pelarangan hukuman fisik dan perbaikan pengawasan di asrama dan sekolah, 5) pemerataan guru dan

sumber daya, 6) penempatan guru dengan insentif khusus di daerah 3T, 7) Monitoring kehadiran guru, dan 8) pendanaan afirmatif.

### **Kebijakan Pendidikan Karakter**

Kebijakan penguatan karakter dirumuskan melalui integrasi dua elemen utama yaitu nilai-nilai nasional dan budaya lokal. Hasilnya penyatuan nilai-nilai karakter nasional dengan nilai-nilai *Lonto Leok* dari masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur menunjukkan efektif dalam membentuk karakter siswa di sekolah. Serta peran kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan transformasional berbasis dimensi ajaran budaya *Lonto Leok* mampu mendorong seluruh komponen sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat, untuk aktif mendukung pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai moral budaya lokal menjadi aset budaya yang penting dalam mendukung pembentukan karakter siswa, serta memperkuat efektivitas perilaku kepemimpinan transformasional di lingkungan sekolah (Effendi et al., 2020).

### **Kebijakan Pendidikan Tinggi**

Penelitian (Madsuha et al., 2022) mengkaji tentang kebijakan pemerintah khususnya UU No. 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, yang membagi status perguruan tinggi menjadi PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker, dan memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas penelitian. Perguruan tinggi dengan status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam publikasi *graphene* karena memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan perencanaan riset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan riset *graphene* di Indonesia sangat bergantung pada struktur kebijakan pendidikan tinggi yang memberi otonomi institusi dan dukungan kebijakan riset yang berkelanjutan.

Implementasi kebijakan di perguruan tinggi Indonesia bersifat dialektis, yakni memadukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Proses ini terjadi pada dua tingkat, yaitu tingkat makro (pemerintah pusat) dan mikro (universitas dan fakultas), yang saling berinteraksi untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada interaksi antara kebijakan yang bersifat sentralistik dengan dinamika lokal di institusi pendidikan tinggi (Gaus et al., 2019).

Penerapan kebijakan pendidikan tinggi berbasis neoliberalisme di Indonesia menghadapi hambatan yang signifikan dari kekuatan politik domestik yang bersifat predatoris, termasuk aktor politik, militer, birokrasi, dan jaringan korporasi yang berafiliasi dengan mereka. Meskipun terdapat upaya kuat dari para teknokrat dan komunitas donor internasional untuk mendorong reformasi berbasis neoliberalisme, implementasi kebijakan tersebut berjalan tersendat. Hambatan tersebut berasal dari aktor-aktor domestik yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan sistem sentralistik dan koruptif yang diwariskan sejak era Orde Baru. Namun, terdapat beberapa keberhasilan terbatas pada aspek tertentu seperti peningkatan kebebasan akademik, yang sejalan dengan agenda kelompok masyarakat sipil dan tidak banyak mendapat resistensi dari kelompok predatoris. Perumusan model pendidikan tinggi tidak hanya sesuai dengan kesepakatan politik

nasional, tetapi juga mampu meningkatkan hasil dalam bidang penelitian dan pengajaran yang lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya (Rosser, 2016).

### **Kebijakan Sistem Desentralisasi**

Menurut (Arif et al., 2024) konfigurasi politik lokal mempengaruhi kebijakan pendidikan dalam konteks sistem desentralisasi di Indonesia. Adanya pembatasan terhadap kewenangan kepala daerah, khususnya dalam keputusan terkait pengangkatan birokrasi, menjadi faktor krusial bagi lahirnya kebijakan pendidikan yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Kabupaten yang menerapkan pembatasan terhadap kekuasaan diskresioner kepala daerah cenderung mampu membangun kapasitas birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kualitas. Sebaliknya, di daerah yang kepala daerahnya memiliki kekuasaan penuh tanpa kendala politik atau kelembagaan, implementasi kebijakan peningkatan mutu bergantung sepenuhnya pada komitmen pribadi kepala daerah. Ketergantungan ini rentan terhadap pembalikan kebijakan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan pendidikan yang berkualitas. Faktor kunci terletak pada struktur kekuasaan lokal dan sejauh mana terdapat mekanisme kontrol terhadap kepala daerah.

### **Kebijakan Tenaga Pendidik**

Penelitian (Zein, 2016) membahas efektifitas kebijakan prajabatan dalam mempersiapkan guru Bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar (SD) di Indonesia, serta implikasi kebijakan tersebut. Walaupun Bahasa Inggris hanya berstatus sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler di tingkat SD menurut Kurikulum 2013, ekspektasi terhadap kualitas guru tetap tinggi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode *grounded theory* menunjukkan bahwa sistem pendidikan prajabatan di Indonesia belum memadai dalam mempersiapkan guru Bahasa Inggris SD. Terdapat kekurangan baik dari sisi kurikulum yang tidak spesifik, keterampilan pedagogis yang minim, hingga kurangnya kualitas dosen pengajar. Dua jalur utama pendidikan prajabatan yang ada yakni Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (yang berfokus pada pendidikan untuk SMP/SMA) dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), keduanya belum mampu memenuhi kebutuhan spesifik guru Bahasa Inggris untuk tingkat SD. Selain itu, kualitas tenaga pengajar di lembaga pendidikan guru juga bervariasi dan sering kali tidak memiliki kompetensi atau pengalaman dalam pengajaran Bahasa Inggris untuk anak usia dini.

## **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap 14 artikel penelitian tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi baik dari sisi perumusan maupun implementasinya. Implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan realitas di lapangan, termasuk adanya pengaruh kuat dari dinamika politik lokal dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan kontekstual masyarakat. Selain itu, sebagian besar kebijakan masih bersifat *top-down* dan kurang melibatkan partisipasi dari komunitas lokal, sehingga

berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi, khususnya di daerah tertinggal dan komunitas adat. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, partisipatif, serta berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang berkeadilan, inklusif, dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah perlunya fokus pada pengembangan bentuk implementasi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta komunitas adat. Disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara dinamika politik lokal dengan efektivitas kebijakan pendidikan, termasuk dampak dari desentralisasi terhadap kualitas layanan pendidikan. Penelitian mendatang dapat mengintegrasikan pendekatan *mixed methods* untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas kebijakan, hambatan implementasi, serta dampaknya terhadap pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Arif, S., Nihayah, R. W., Usman, S., & Rarasati, N. (2024). Does decentralisation promote learning? Local political settlements and education policies in Indonesia. *Compare*. <https://doi.org/10.1080/03057925.2024.2344523>
- Effendi, Y. R., Bafadal, I., Sudana, I. N. D., & Arifin, I. (2020). The principal transformational leadership strategy in developing national policies for strengthening character education in eastern Indonesia. *Italian Journal of Sociology of Education*, 12(2), 51–78. <https://doi.org/10.14658/pupj-ijse-2020-2-3>
- Gaus, N., Yunus, M., Karim, A., & Sadia, H. (2019). The analysis of policy implementation models in higher education: the case study of Indonesia. *Policy Studies*, 40(1), 92–109. <https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1539224>
- Jannata, T., Sumaryanto, Hadi, S., & Setiawan, C. (2024). Implementation of two policies in physical education in indonesia: structural equiting model analysis. *Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF)*, 18–24. <https://doi.org/10.47197/retos.v57.10404>
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarok, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2172930>
- Madsuha, A. F., Kurniawan, Y., Permana, P. A., & Sumaedi, S. (2022). The sustainability of graphene research: A novel approach in assessing the role of higher education policies in developing countries—the case of Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/su14010302>
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., Stewart, L. A., Estarli, M., Barrera, E. S. A., Martínez-Rodríguez, R., Baladia, E., Agüero, S. D., Camacho, S., Buhring, K., Herrero-López, A., Gil-González, D. M., Altman, D. G., Booth, A., ... Whitlock, E. (2016). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Revista Espanola de Nutricion Humana y Dietetica*, 20(2), 148–160. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>
- Mukminin, A. (2021). Ethics in Education: an Ethical Analysis of the National Standardized Exam Policy in Indonesia. *Logos (Lithuania)*, 109, 172–179. <https://doi.org/10.24101/logos.2021.88>
- Nengyanti, Yusnaini, Imania, K., & Santoso, A. D. (2024). Policy Transfer for Sexual Violence Prevention and Management in Indonesian Higher Education Institutions. *Generos*, 13(2), 137–155. <https://doi.org/10.17583/generos.12738>
- Ninghardjanti, P., Murtini, W., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2023). Evaluation of the Smart Indonesia Program as a Policy to Improve Equality in Education. *Sustainability (Switzerland)*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/su15065114>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. In *The BMJ* (Vol. 372). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Pambudi, N. A., & Ulfa, D. K. (2024). The geothermal energy landscape in Indonesia: A comprehensive 2023 update on power generation, policies, risks, phase and the role of education. In *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (Vol. 189). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.114008>
- Papanikos, G. T. (n.d.). *Education Policy*. <https://www.researchgate.net/publication/358529736>
- Parker, L., & Sudibyo, L. (2024). Why young people leave school early in Papua, Indonesia, and education policy options to address this problem. *Compare*, 54(1), 146–162. <https://doi.org/10.1080/03057925.2022.2084037>
- Raihani, R. (2018). Education for multicultural citizens in Indonesia: policies and practices. *Compare*, 48(6), 992–1009. <https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1399250>
- Ridgway, R. (2023). Choice and control: corpus-based discourse analysis of teacher education policy in England (2010-2021). *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2212118>
- Romlah, S., Imron, A., Maisyaroh, Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>
- Rosser, A. (2016). Neo-liberalism and the politics of higher education policy in Indonesia. *Comparative Education*, 52(2), 109–135. <https://doi.org/10.1080/03050068.2015.1112566>
- Saa, S. (2024). MERDEKA CURRICULUM: ADAPTATION OF INDONESIAN EDUCATION POLICY IN THE DIGITAL ERA AND GLOBAL CHALLENGES. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(3). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n3-168>
- Sarghini, A., Talebi, B., & Hoseinzade, O. (2023). Elements of the educational policy model in schools (a systematic review). *Journal of Education and Health Promotion*, 12(1), 42. [https://doi.org/10.4103/jehp.jehp\\_221\\_22](https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_221_22)
- Sharma, A., & Bhattacharai, P. C. (2022). Mixed Methods Research in Employability Discourse: A Systematic Literature Review Using PRISMA. In *Education Research International* (Vol. 2022). Hindawi Limited. <https://doi.org/10.1155/2022/4848220>
- Sumarjono, \*, Nopembri, S., & Yuliarto, H. (2024). Genealogy on Policies and Strategies of Physical Education for Elementary Schools in Indonesia Genealogía de Políticas y Estrategias de Educación Física para Escuelas Primarias en Indonesia. In *Retos* (Vol. 57). <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index>
- Thoma, N. (2022). The Hierarchization of Educational Rights of Minorities. A Critical Analysis of Discourses on Multilingualism in South Tyrolean Preschools. *Zeitschrift Für Erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung (ZEM)*, 1(2), 134–150. <https://doi.org/10.3224/zem.v1i2.04>
- Yasdin, Y., Parenrengi, S., Hasriani, H., & Mahande, R. D. (2023). Policies and politics development of vocational education in Indonesia: a historical perspective. *Asian Education and Development Studies*, 12(4–5), 297–309. <https://doi.org/10.1108/AEDS-06-2023-0059>
- Zein, S. (2016). Pre-service education for primary school English teachers in Indonesia: policy implications. *Asia Pacific Journal of Education*, 36, 119–134. <https://doi.org/10.1080/02188791.2014.961899>